

ABSTRAK

Penelitian hukum yuridis empiris ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari sumber utama dengan penelitian lapangan melalui wawancara terstruktur yang di dilakukan di Kota Jambi, dengan fokus penelitian di KPP Pratama Jambi Telanaipura, kemudian di kantor BAZNAS Kota Jambi serta kawasan Rt 24, Kel. Kenali Besar. Dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh manakah penerapan kebijakan Pasal 22 tersebut terkhusus di Kota Jambi; terkait apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan secara menyeluruh ataukah ada kendala/hambatan dalam upaya pengimplementasiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik BAZNAS maupun KPP Pratama Kota Jambi telah mengetahui dan memenuhi pelaksanaan kebijakan ini dengan memfasilitasi dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan. Namun, implementasi Pasal 22 tersebut di Kota Jambi ini belum maksimal dan belum mampu memenuhi harapan pemerintah mengurangi beban ganda yang ditanggung oleh masyarakat muslim secara merata. Terbukti dari tidak banyaknya wajib pajak muslim yang memanfaatkan zakat mereka sebagai komponen pengurangan penghasilan kena pajak dan banyak dari mereka yang masih belum mengetahui akan kebijakan tersebut serta beberapa faktor lain membuat mengapa pemanfaatan kebijakan tersebut masih minim di Kota Jambi.

Kata Kunci: *Implementasi, Zakat, Zakat Profesi, Pajak Penghasilan, Penghasilan Kena Pajak*

ABSTRACT

This empirical jurisprudence research is based on primary and secondary data obtained from primary sources with field research through structured interviews conducted in Jambi City, with the focus of research at KPP Pratama Jambi Telanaipura, then at the office of BAZNAS City Jambi as well as the area of Rt 24, Kel Kenali Big. Using qualitative methods presented in descriptive form, this study aims to investigate to what extent the implementation of the policy of Article 22 is specific to the City of Jambi; related to whether the policy has been fully implemented or whether there are obstacles / barriers in the effort to implement it. The results of the research show that both BAZNAS and KPP Pratama Kota Jambi have known and fulfilled the implementation of this policy by facilitating and implementing the policy in accordance with the regulations. However, the implementation of Article 22 in Jambi City is not maximum and has not been able to meet the government's expectations of reducing the double burden borne by the Muslim community equally. Evidence of the lack of Muslim taxpayers who use their zakat as a component of reducing taxable income and many of those who are still unaware of the policy as well as some other factors make why the use of such policy is still minimal in Jambi City.

Keywords: *Implementatiom, Zakat, Income zakat, Income Tax, Taxable income.*